

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi dan misi yang digalakkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Program Kerja Tahun 2019-2024 mencakup lima target visi yaitu adanya harapan serta dorongan yang lebih kepada Indonesia untuk dapat produktif, fleksibel, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dimasa mendatang. Salah satu dari lima arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi *Nawacita* dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045 yaitu penekanan pada pembangunan infrastruktur¹. Visi tersebut menjadi titik tekan dalam pemerintahan mereka dimana memiliki fokus adanya hubungan satu sama lain dari pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor kelautan perikanan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Selain itu, terdapat 2 (dua) arahan Presiden kepada

¹ Reporter Berita Utama, "5 Visi Dan Misi Presiden Jokowi Periode 2019-2024," *Harian Indonesia.Id 100% Merdeka*, 2019, <https://www.harianindonesia.id/berita-utama/5-visi-dan-misi-presiden-jokowi-periode-2019-2024.html>. (diakses pada Sabtu, 5 Maret 2022, pukul 22.41 WIB)

Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut :

1. Menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar perikanan kelautan, dan pelaku usaha yang terlibat di bidang perikanan kelautan.
2. Memperkuat serta mengoptimalkan program-program perikanan, khususnya program perikanan budidaya².

Guna mewujudkan arah kebijakan strategis tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memiliki regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada pengelolaan perikanan di Indonesia. Peraturan tersebut berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi stakeholder bidang perikanan untuk menghadapi masalah dan perubahan yang terjadi di bidang perikanan yang berkaitan dengan kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan, perkembangan metode pengelolaan perikanan yang efektif dan perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya ikan.

² Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas memiliki potensi kekayaan yang mumpuni dari sektor kelautan dan perikanan. Namun sumber daya kelautan dan perikanan tersebut harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan sehingga menciptakan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi-potensi sektor perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Provinsi-provinsi Potensial Sektor Perikanan di Indonesia

No.	Provinsi	%	Keterangan
1.	Maluku	5,51	Sektor Potensial
2.	Sulawesi Tenggara	4,36	Sektor Potensial
3.	Sulawesi Barat	3,95	Sektor Potensial
4.	Gorontalo	3,65	Sektor Potensial
5.	Bengkulu	2,88	Sektor Potensial
6.	Maluku Utara	2,85	Sektor Potensial
7.	Sulawesi Utara	2,69	Sektor Potensial
8.	Kepulauan Bangka Belitung	2,67	Sektor Potensial
9.	Lampung	2,65	Sektor Potensial
10.	Sulawesi Tengah	2,42	Sektor Potensial

Sumber: Olahan Peneliti dari Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2022

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa 10 provinsi di Indonesia diatas memiliki persenan sebagai provinsi yang memiliki sektor potensial perikanan. Persenan tersebut diilihat menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) masing-masing Provinsi menurut Lapangan Usaha atas periode tahun 2017-2021 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Indonesia atas periode tahun 2017-2021. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Maluku memiliki

persen-an tertinggi dan Sulawesi Tengah memiliki persen-an terendah. Sedangkan Provinsi Bengkulu memiliki persen-an sebesar 2,88 %. Mengingat Provinsi Bengkulu sendiri dengan memiliki garis pantai sepanjang 525 KM tentu mampu menghasilkan sumber daya laut yang optimal.

Khususnya dibidang kelautan dan perikanan, Provinsi Bengkulu memiliki sektor perikanan tangkap, budidaya dan sektor pengolahan pemasaran perikanan yang berpotensi sehingga menjadi peluang investasi yang menjanjikan apabila dilaksanakan dengan maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Bengkulu menyebutkan perlu adanya koordinasi dan sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan ekonomi kemaritiman provinsi Bengkulu. Sehingga pada akhirnya nanti dapat berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.³

Berkenaan dengan begitu luasnya wilayah perairan di Indonesia dan pengelolaan sumber daya perikanan yang telah berpayung hukum, pemerintah Indonesia selaku aktor lembaga tertinggi berkewenangan memberikan sebagian kegiatan pengelolaan wilayah perairan kepada pemerintah daerah baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk kegiatan menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Urusan pengelolaan wilayah perairan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, ruang

³ APS, "Potensi Kemaritiman Bengkulu Sangat Besar", *Pemerintah Provinsi Bengkulu*, [Potensi Kemaritiman Bengkulu Sangat Besar – PEMERINTAH PROVINSI BENGGKULU \(bengkuluprov.go.id\)](http://PotensiKemaritimanBengkuluSangatBesar-PEMERINTAHPROVINSIBENGGKULU(bengkuluprov.go.id)) (diakses pada 21 Agustus 2022, pukul 21.00 WIB)

lingkup pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yaitu urusan terkait pengelolaan urusan kelautan, pesisir dan pulau terpencil sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam urusan bidang perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan dan pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan).⁴ Pentingnya upaya koordinasi pembangunan ekonomi maritim lintas provinsi, daerah, dan kota agar pembangunan yang efektif di sektor ini dapat menggali potensi yang sudah ada di daerah untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya memaksimalkan potensi perikanan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu turut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dimana dalam pemerintahannya memiliki target pencapaian peningkatan sektor dibidang perikanan terutama sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi Bupati Kabupaten Mukomuko yang mana menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan.⁵ Kabupaten Mukomuko sebagai daerah dimana pemerintahannya memiliki komitmen dalam meningkatkan produksi sektor perikanan mengingat potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan besarnya potensi perikanan dimana produksi ikan diperoleh dari pengembangan

⁴ Okta. P. K Putra, Amiek Soemarmi, and Amalia Diamantina, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Pati," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15536>.

⁵ RPJMD Kabupaten Mukomuko 2021-2026

budidaya yang didukung oleh irigasi Air Manjuto, Danau Nibung, Air Selagan, Danau Lebar dan beberapa potensi laut, sungai, dan perairan besar lainnya.⁶

Berdasarkan dengan luasnya wilayah perairan di Kabupaten Mukomuko, aktivitas dominan yang dilakukan oleh masyarakat yakni sektor perikanan darat sehingga mata pencaharian masyarakat Kabupaten Mukomuko secara garis besar nelayan. Jumlah nelayan berdasarkan desa/kelurahan di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2. Jumlah Nelayan menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mukomuko tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Nelayan (orang)
1.	Air Rami	Air Rami	861
		Talang Rio	106
		Jumlah	967
2.	Ipuh	Medan Jaya	195
		Pasar Baru	223
		Pasar Ipuh	142
		Pulau Payung	150
		Pulau Baru	167
		Tanjung Harapan	152
		Pulau Makmur	196
		Semundam	163
		Air Buluh	181
	Jumlah	1.569	
3.	Teramang Jaya	Mandi Angin	365
		Nelan Indah	325
		Pasar Bantal	477
		Jumlah	1.167
4.	Kota Mukomuko	Bandar Ratu	106

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, *Kabupaten Mukomuko Dalam Angka Tahun 2021* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2021).

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Nelayan (orang)
		Ujung Padang	57
		Pasar Mukomuko	74
		Koto Jaya	964
		Pasar Sebelah	105
		Pondok Batu	86
		Tanah Rekah	42
		Jumlah	1.434
5.	Air Dikit	Air Dikit	86
		Pondok Lunang	65
		Jumlah	151
6.	XIV Koto	Desa Baru Pelokan	97
		Jumlah	97
		TOTAL	5.942

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2022

Berdasarkan data diatas, jumlah nelayan di Kabupaten Mukomuko yaitu mencapai 5.942 orang dimana nelayan terbanyak terdapat di Kecamatan Ipuh yakni sebanyak 1.569 orang. Sedangkan kedua terbanyak yaitu berada di Kecamatan Kota Mukomuko dimana terdapat jumlah nelayan paling banyak yaitu 964 orang yang berada di Kelurahan Koto Jaya. Disamping itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor perikanan Kabupaten Mukomuko didominasi oleh nelayan perikanan tangkap. Menurut data yang tertera pada profil Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2019, dari jumlah 5.942 orang tenaga kerja nelayan sebanyak 2.148 nelayan berprofesi sebagai nelayan tangkap dan sisanya sebanyak 3.794 nelayan bekerja sebagai pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.⁷

⁷ Dokumen Profil Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2019

Berkaitan dengan banyaknya nelayan di Kabupaten Mukomuko yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan tangkap, jika dilihat perbandingannya dengan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup baik. Produksi perikanan tangkap berdasarkan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI/PPI) dan Volume Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2019-2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah TPI/PPI	Penangkapan (ton)
1.	Bengkulu Selatan	1	1.905,10
2.	Rejang Lebong	6	-
3.	Bengkulu Utara	3	5.930,00
4.	Kaur	1	2.941,6
5.	Seluma	1	1.771,5
6.	Mukomuko	5	19.090,50
7.	Lebong	-	-
8.	Kepahiang	6	7.560
9.	Bengkulu Tengah	3	1.149,40
10.	Kota Bengkulu	1	29.502,40
	Total	25	62.290,50

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan data diatas, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mukomuko menduduki peringkat kedua terbanyak se-Provinsi Bengkulu setelah Kota Bengkulu. Data tersebut juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Indra Cahyadinata, dkk (2018) yang menyatakan bahwa :

Di Provinsi Bengkulu, nilai produksi perikanan meningkat rata-rata sekitar 20,24% per tahun. Dengan kontribusi sebesar 45,36%, Kota Bengkulu memiliki pangsa nilai perikanan tangkap tertinggi, disusul oleh Kabupaten Mukomuko (28,06%) dan Kabupaten Bengkulu Utara (13,59%). Kabupaten Seluma sebesar 1,85% merupakan kabupaten dengan kontribusi terendah.⁸

Hasil tangkapan ikan yang mendarat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sering ditindaklanjuti dengan hanya dijual dalam bentuk segar. Bila produksi atau hasil tangkapan berlimpah maka banyak ikan yang dijual dengan harga sangat murah bahkan banyak yang dibuang. Hal serupa turut dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko terkhususnya nelayan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Berkenaan dengan hasil tangkapan di Kabupaten Mukomuko yang cukup banyak, kendala dan permasalahan yang terjadi adalah terkait hasil produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini

Tabel 1.4. Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan se-Provinsi Bengkulu tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Pengolahan Hasil Ikan (kg)	Hasil Olahan
1.	Bengkulu Selatan	71.640 kg	Daging ikan lumatan, kerupuk ikan, ikan asap/salai, bakso ikan, tekwan, pempek
2.	Rejang Lebong	2.800 kg	Ikan salai, bakso ikan, pempek
3.	Bengkulu Utara	110.796 kg	nugget, kerupuk ikan, ikan asap/salai, bakso ikan, tekwan,

⁸ Indra Cahyadinata, Achmad Fahrudin, and Rahmat Kurnia, "Potensi Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Pulau Kecil Terluar (Studi Kasus Pulau Enggano Provinsi Bengkulu) Potency Of Catch Fisheries Development in Small Outer Island (Case Study in Enggano Island Bengkulu Province)" 17, no. 21 (2018): halaman 156.

			pempek
4.	Kaur	3.117 kg	Kerupuk ikan, bakso ikan, dan dodol rumput laut
5.	Seluma	1.259 kg	Bakso ikan, dan ikan asin
6.	Mukomuko	438.221 kg	Ikan asin
7.	Lebong	4.440 kg	Kerupuk ikan dan ikan salai/asap
8.	Kepahiang	46.470 kg	kerupuk ikan, ikan asap/salai, bakso ikan, tekwan, pempek,
9.	Bengkulu Tengah	75.590 kg	Kerupuk ikan, ikan asap, ikan asin, ikan giling
10.	Kota Bengkulu	43.354 kg	Nugget, kerupuk ikan, ikan asap, bakso ikan, ikan asin, ikan giling, abon ikan, beledang goreng, sala, lobster goreng dan presto
	Total	797.687 kg	

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki jumlah produksi olahan dan pemasaran yang tertinggi se-Provinsi Bengkulu. Namun kendalanya, produksi hanya sebatas satu olahan saja yakni olahan ikan asin. Hasil tangkapan ikan yang banyak seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1.6 tidak dibarengi dengan hasil olahan yang beragam. Pendapat yang sama juga diungkap oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang menjelaskan bahwa:

Berdasarkan data di Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, hasil produksi ikan laut dari pemanfaatan perairan Mukomuko mencapai 22.065 ton per tahun untuk data tahun 2020 lalu yang jika diuangkan mencapai rata-rata Rp. 530 miliar. Selain itu, jenis ikan hasil tangkapan nelayan Mukomuko memiliki macam variasi mulai dari ikan tongkol, ikan kembung, teri, tenggiri, layur dan juga termasuk udang. Namun disamping banyaknya hasil tangkapan

nelayan, saat ini kami masih memiliki kendala dalam pengolahan dan pemasaran ikan di Kabupaten Mukomuko.⁹

Selain itu, melimpahnya hasil tangkapan ikan di Kabupaten Mukomuko serta potensi pengelolaannya berupa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam hal ini telah sejalan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Mukomuko, Sapuan dan Wasri dimana target utama pemerintahan mereka yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Mukomuko yang maju, mandiri berkarakter dan sejahtera yang berbasis agro, perikanan dan berilmu pengetahuan. Dilansir dari berita Harian Radar Mukomuko, 5 misi pembangunan Kabupaten Mukomuko dalam periode 5 tahunan pemerintahan Sapuan dan Wasri yakni menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agro industry perdagangan hasil pertanian dan perikanan¹⁰. Meski tahun sebelumnya menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Mukomuko tetap menjalankan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan arah tujuan program yakni peningkatan sumber daya Poklhasar yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil olahan dan pemasaran ikan.

Kabupaten Mukomuko dalam wilayah pemerintahannya terdiri dari 15 kecamatan dimana 6 kecamatan diantaranya merupakan wilayah pesisir, pantai dan lautan. Berangkat dari luasnya wilayah perairan di Kabupaten Mukomuko, maka

⁹ Radar Mukomuko, “Tangkapan Nelayan Mukomuko Mencapai Ribuan Ton Pertama,” *Harian Radar Mukomuko* (Kabupaten Mukomuko, 2021), diakses pada 15 November 2021, pukul 09.30 WIB, <https://radarmukomuko.rakyatbengkulu.com/tangkapan-nelayan-mukomuko-mencapai-ribuan-ton-pertahun/>.

¹⁰ Radar Mukomuko, “Bupati Sapuan Beberkan 13 Indikator Pembangunan Di Mukomuko,” *Harian Radar Mukomuko*, 2021, <https://radarmukomuko.rakyatbengkulu.com/bupati-sapuan-beberkan-13-indikator-pembangunan-di-mukomuko/radarmukomuko.rakyatbengkulu.com>. diakses pada 15 November 2021, pukul 12.15 WIB

dalam pengelolaan potensi perikanan tersebut dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko memiliki peranan baik dalam pengelolaan perikanan tangkap, budidaya ikan maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk pada tahun 2016 yang pada hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko. Kemudian mengalami perubahan nomenklatur sehingga berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2017-2021, terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan sesuai dengan isu dan permasalahan yang ada di Kabupaten Mukomuko, program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5. Program Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program
Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
	2. Program pengelolaan perikanan tangkap
	3. Program pengelolaan perikanan budidaya
	4. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
	5. Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2022

Program-program yang telah disusun dalam dokumen Rencana Strategis merupakan rencana aksi dari Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam menanggapi permasalahan dan isu-isu strategis sektor perikanan yang ada di Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2021, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pelaksanaan program yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.6. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.132.849.793,00
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.916.198.041,00
3.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Rp.434.584.600,00
4.	Program Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 48.797.280,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2022

Dari beberapa program yang terdapat dalam rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Hasil perikanan perlu diolah agar dapat menambah nilai dan mengoptimalkan nilai ekonomisnya. Dengan begitu, pemasaran hasil perikanan akan lebih mudah dan daya saing produk yang berkualitas akan meningkat. Arah kebijakan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebut yakni terciptanya peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia pengolah hasil perikanan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil ikan olahan yang ada di Kabupaten Mukomuko tiap tahunnya. Beberapa kegiatan terkait program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7. Kegiatan dalam Pelaksanaan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2021

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Promosi Produk Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berkenaan dengan target optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah mendapat dukungan oleh Bupati Mukomuko, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam hal ini menjadi implementor dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan sasaran adanya peningkatan produksi olahan oleh Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang menjelaskan bahwa:

“Titik tekan pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Bupati terpilih saat ini di Kabupaten Mukomuko salah satunya menekankan pada aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini dikarenakan potensi perikanan yang lumayan baik di Kabupaten Mukomuko terutama hasil tangkap ikan namun terhadap pengolahan perikanan masih terbilang sederhana. Padahal jika bisa diupayakan kembali, pengolahan perikanan ini bisa menciptakan olahan yang tidak hanya itu-itu saja (ikan kering). Maka dari itu artinya, kami kembali diberi tugas untuk dapat mengoptimalkan pengolahan perikanan ini dengan memperhatikan mutu dan standar pengolahan yang berkualitas walaupun saat ini kita masih menghadapi situasi Covid-19”. (Hasil wawancara dengan Am Azbas Novyan, S.Pi, M.Si, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko pada hari Senin, 15 November 2021 pukul 09.00-10.00 WIB)

Berkaitan dengan beberapa fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka alasan peneliti meneliti terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan mengambil lokus di Kabupaten Mukomuko yaitu dilatarbelakangi dengan melimpahnya hasil tangkapan di wilayah Kabupaten Mukomuko dimana pada Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah terbesar kedua dalam hasil tangkapan ikan sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan hasil produk pengolahan perikanan yang beragam. Namun pada kenyataan yang terjadi, hasil tangkapan yang berlimpah tidak didukung dengan pengolahan dan pemasaran yang beragam. Selain itu, adanya dukungan dari Bupati Mukomuko terkait program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menekankan adanya peningkatan target pada aspek pengolahan dan pemasaran yang mengakibatkan program ini berjalan.

Kelompok sasaran dari program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yakni Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) dan Koperasi Perikanan yang merupakan gabungan dari beberapa Poklahsar yang telah berbadan hukum. Berikut data jumlah pelaku usaha perikanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Mukomuko yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8. Data Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan
1.	Ipuh	18 kelompok
2.	Kota Muko-Muko	14 Kelompok
3.	Teramang Jaya	25 Kelompok
4.	Penarik	2 kelompok
	Jumlah	60 Poklahsar

Sumber: Bidang PPUP Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2021

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kelompok pengolah dan pemasar perikanan paling banyak terdapat di Kecamatan Teramang Jaya. Pada kecamatan tersebut, pengolah dan pemasar ikan lebih banyak mengandalkan jenis usaha pengolahan ikan kering atau ikan asin dan pengolahan ikan asap. Mengacu kepada tabel 1.2, jumlah nelayan terbanyak terdapat di Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Kota Mukomuko. Jumlah nelayan yang banyak pada daerah tersebut menciptakan dinamika kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang berpotensi. Beberapa Poklahsar yang beroperasi menciptakan olahan dan pemasaran dari hasil tangkapan ikan di Mukomuko yakni Poklahsar Maju Mandiri dan Maju Bersama.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan saat wawancara awal oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang menjelaskan bahwa :

“Bidang ini memfokuskan kepada bentuk pelatihan pengolahan perikanan dari yang sebelumnya sudah dibudidayakan kemudian kami bertugas meningkatkan volume permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan. Namun, saat ini banyak sekali hambatan terutama dari segi sarana dan prasarana serta anggaran sehingga kami hanya melanjutkan pengolahan ikan kering dan ikan asap yang sebelumnya juga masih berjalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Jumlah produksi olahan pada tahun 2020 yaitu sebesar 438.221 kg didominasi oleh olahan ikan kering dan ikan asap.” (Hasil wawancara awal dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Meylani S.TP pada Selasa, 16 November 2021, pukul 09.00-10.00 WIB)

Berdasarkan hal tersebut, Poklahsar dan Koperasi Perikanan diberi bantuan berupa sarana dan prasarana serta pelatihan pengolahan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan pokok dari program yang ada sehingga kelompok pengolah dapat menciptakan dan memberikan olahan baru yang dapat menunjang potensi wilayah Kabupaten Mukomuko maupun pendapatannya. Namun, masih banyak dari Poklahsar yang belum mengoptimalkan kegiatan pengolahannya. Salah satunya dikarenakan kurangnya koordinasi oleh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Komunikasi dapat mempengaruhi kinerja dimana semakin baik komunikasi yang dilakukan maka akan semakin baik juga kinerja yang dilakukan. Komunikasi dan koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program menentukan bagaimana informasi berjalan. Koordinasi

yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada Poklhasr mengalami kendala dikarenakan adanya aturan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH).

Pandangan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan atau implementasi program dipengaruhi oleh beberapa variabel salah satunya yaitu variabel sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program baik sumber daya manusia atau sumber daya non-manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menemukan fenomena permasalahan dalam pelaksanaan program dimana pada variabel sumber daya manusia terdapat kendala dan keterbatasan tenaga kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut terlihat dari jumlah pegawai yang menjalankan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.9. Daftar Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2021

No.	Bidang	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubag	2
4.	Kepala Bidang	3
5.	Kepala Seksi	9
6.	Staf	7
	TOTAL	23

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Pada tabel 1.8 dapat dilihat bahwa di Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko memiliki 23 orang pegawai sebagai pelaksana program yang mengakibatkan pelaksanaan program kurang optimal. Hal tersebut turut diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan (PPUP)

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko :

“Permasalahan belum optimalnya program tersebut salah satunya yaitu karena kurangnya sumber daya dan tenaga kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ini. Di Dinas Perikanan ini, petugas dinas baik itu Kabid, Kasi atau staff merupakan sumber daya yang penting dalam pelaksanaan kegiatan apapun, namun jumlahnya masih terbilang kurang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ini”. (Hasil wawancara awal dengan Erza Wandu, S.Pi, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu, 17 November 2021 pukul 10.00-11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara awal diatas, permasalahan kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tiap tahunnya pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Padahal berdasarkan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Selain itu, kendala keterbatasan anggaran akibat refocusing anggaran Covid-19 turut mempengaruhi pelaksanaan program. Hal ini diperkuat dengan penjelasan

oleh Staff bidang PPUP Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang menjelaskan bahwa

“...anggaran untuk program ini yang bersumber dari DAU banyak yang telah dialihkan untuk kegiatan penanganan covid-19 di Kabupaten Mukomuko. Terpangkasnya anggaran ini menjadi kendala jalannya program dan kegiatan di PPUP serta akitivitas yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi Poklahsar. Untuk usulan bantuan ke KKP, sudah kami laksanakan sebagai bentuk tugas kami memfasilitasi Poklahsar”. (Hasil Wawancara awal dengan Bapak Rofi Wisma Restianto, S.Pi selaku staf bidang PPUP Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu, 24 November 2021 pukul 10.00-11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program mengalami kendala pada sumber daya anggaran karena refocusing anggaran Covid-19. Adanya prioritas tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pada program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan banyak dipangkas dan hanya melaksanakan beberapa kegiatan yang sedang berjalan. Walau program tersebut didukung oleh Bupati Mukomuko sebagai program prioritas sektor perikanan namun untuk anggaran program tetap dipangkas untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mukomuko.

Selain itu, permasalahan terkait pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Mukomuko juga terkendala pemasaran hasil tangkapan dan olahan ikan yang hanya beredar di Kabupaten Mukomuko dan di wilayah sekitaran Kabupaten Mukomuko seperti Bengkulu, Sumatera Barat dan Jambi. Hal tersebut dikarenakan ikan laut di Mukomuko kurang diminati sehingga banyak nelayan Mukomuko yang mengeluhkan

pemasaran ikan laut tersebut untuk ke luar daerah. Pendapat yang sama juga diungkap oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam Harian Radar Mukomuko yang menjelaskan bahwa:

Terkait pemasaran hasil ikan memang masih menjadi ‘PR’ bagi kita. Hal ini karena link dan chanel pemasaran kita yang kurang. Namun untuk kualitas hasil tangkapan ikan di daerah kita juga tidak kalah saing. Untuk saat ini hasil tangkapan ikan laut masih dijual di daerah kita kemudian di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Untuk kedepannya akan diusahakan membangun jaringan dengan penampung daerah yang lain.¹¹

Berdasarkan uraian fenomena diatas, pemanfaatan potensi perikanan melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tersebut secara keseluruhan masih memiliki masalah. Beberapa faktor yang menjadi fenomena permasalahan yang peneliti temukan dalam program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yakni kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya non-manusia berupa sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pemanfaatan potensi yang optimal dikarenakan kurangnya sumber daya anggaran, kemudian kurangnya pemahaman implementor terhadap pelaksanaan program, serta perlunya iklim usaha yang baik dan kondusif untuk mendorong potensi perikanan yang ada. Fenomena-fenomena yang ditemukan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut terkait Implementasi

¹¹ Mukomuko, “Tangkapan Nelayan Mukomuko Mencapai Ribuan Ton Pertahun.” *Harian Radar Mukomuko* (Kabupaten Mukomuko, 2021), diakses pada 15 November 2021, pukul 10.00 WIB, <https://radarmukomuko.rakyatbengkulu.com/tangkapan-nelayan-mukomuko-mencapai-ribuan-ton-pertahun/>.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Implementasi Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik dimana terdapat kajian dalam konsentrasi kebijakan publik yaitu berkaitan dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan dengan permasalahan ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan, masukan serta dapat menjadi sumbangsih pikiran untuk segenap orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan terutama Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko



